BAB IV

KESIMPULAN

Korea Utara merupakan sebuah negara otoriter yang terletak di wilayah Semenanjung Korea. Negara ini dikenal dengan program pengembangan senjata nuklir terbesar di dunia. Namun dibalik keberadaan proyek besar tersebut, Korea Utara dibawah kepemimpinan rezim Kim bukan merupakan negara yang seutuhnya sejahtera. Hal ini terlihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan keadaan politik internal Korea Utara yang tidak stabil dan tidak memihak terhadap rakyatnya. Oleh karena ketidakstabilan tersebut cenderung menyebabkan pergerakan atau perpindahan masyarakat Korea Utara sejak masa akhir Perang Dingin ke beberapa negara terdekat seperti Cina, Rusia, dan Korea Selatan.

Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 di Semenanjung Korea disebabkan oleh perbedaan ideologi dan manuver dukungan blok sosialis dan blok liberalis. Wilayah Korea Utara pada saat itu mendapatkan dukungan dari Rusia dan Cina, sementara Korea Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Akibatnya banyak warga masyarakat Semenanjung Korea melakukan perpindahan baik di Utara dan Selatan untuk mencari perlindungan dari gencatan senjata antara dua wilayah tersebut. Perang Korea berakhir pada tahun 1953 ditandai dengan perjanjian penghentian aksi genjatan senjata dan pembentukan wilayah normalisasi bernama *Demilitarized Zone* (DMZ).

Setelah itu pada awal tahun 1990-an Korea Utara dilanda dengan adanya bencana alam kekeringan yang berkepenjangan hingga tahun 1998. Peristiwa yang

dinamakan dengan *Great Famine* ini menyebabkan hampir 3 juta orang masyarakat Korea Utara meninggal karena kelaparan. Kelaparan besar di seluruh wilayah juga terjadi akibat ketidak-mampuan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari bencana kekeringan tersebut. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang paling besar di Korea Utara yang merugikan masyarakat dan pemerintahnya. Krisis ekonomi yang dilanda Korea Utara juga akibat dari berhentinya bantuan pasokan makanan dari Cina dan Rusia.

Pembelotan masyarakatnya mulai signifikan terjadi ketika masa Perang Korea. Pembelotan masyarakat Korea Utara pada awalnya dilatarbelakangi oleh peristiwa konflik dan bencana alam. Krisis ekonomi negara dilanjutkan dengan terjadi bencana kekeringan berkepanjangan juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat Korea Utara. Sejak saat itu banyak masyarakat Korea Utara memutuskan untuk meninggalkan Korea Utara dengan berpindah ke wilayah yang lebih aman.

Pada tahun 2011 Kim Jong Un diumumkan sebagai penerus kepemimpinana rezim Kim setelah ayahnya Kim Jong Il. Semenjak menjabat sebagai pemimpin *Korea's Worker Party* dan pemerintahan, Kim Jong Un telah memperlihatkan orientasi kepemimpinannya dan karakter pemerintahnnya. Orientasi pemerintahan Kim Jong Un mengutamakan pembangunan proyek pengembangan senjata nuklir dan memperkuat legitimasi kepemimpinan rezim di Korea Utara. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kebijakan – kebijakan politik internal dan sipil Korea Utara.

Situasi Korea Utara yang terjadi selama 8 - 10 tahun terakhir sangat berbeda dengan kondisi pada masa perang. Walaupun angka pembelotan yang secara perlahan menurun karena kebijakan Kim Jon Un yang semakin ketat, tidak menutup kemungkinan hal tersebut hanya menghambat bukan

berarti menghentikan fenomena pembelotan atau *border-crossing* masyarakat Korea Utara. Munculnya gelombang pembelotan masyarakat Korea Utara dalam fase dan masa yang berbeda menciptakan motivasi dan alasan yang berbeda - beda pula.

Fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara tidak terjadi begitu saja. Terdapat banyak alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan khususnya sejak Kim Jong Un mengambil alih pemerintahan. Sebelumnya latar belakang masyarakat membelot karena konflik, bencana, dan krisis ekonomi. Karena keadaan tersebut mengharuskan measyarakat untuk berpindah agar dapat bertahan hidup. Namun alasan tersebut menjadi berbeda dalam kurun 10 tahun terakhir, terutama sejak Kim Jong Un mengambil alih pemerintahan.

Di Korea Utara juga terdapat klasifikasi sistem kasta yang menggolongkan setiap individu kedalam tiga tingkatan. Tiga kategori tersebut merupakan; (I) kelas utama atau *Core Class* yang terdiri dari individu atau keluarga yang memperjuangkan negara seperti revolusioner, pahlawan, keluarga non-kombatan dan tentara yang gugur pada saat Perang Korea (II) kelas menengah atau *Wavering Class* yang terdiri dari komponen – komponen warga negara termasuk keluarga dan keturunannya yang mengkhianati negara dan membelot ke negara lain, dan (III) adalah kelas paling bawah atau *Hostile Class* yang terdiri dari warga negara yang mendukung Jepang atau Amerika, masyarakat yang kapitalis, dan mata – mata terhadap negara.

Sementara itu adanya sistem *Songbun* di Korea Utara menciptakan sistem ekonomi yang tidak merata oleh pemerintah. Sebelum Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan, di Korea Utara berlaku sistem rasio yang

mengatur pendistribusian secara merata bagi seluruh masyarakat Korea Utara. Namun sejak Kim Jong Un mengambil kepemimpinan, alih sistem rasio sudah tidak berlaku secara efektif bahkan telah hilang. Hal tersebut terjadi karena elit penguasa yang berdomisili di Pyongyang mengatur sistem tersebut dengan mengutamakan orang – orang yang berada di Pyongyang.

Menurut penulis dengan menggunakan analisa teori *Push Pull Factors*, penulisan ini dapat mengklarifikasikan faktor – faktor pembelotan yang dilakukan masyarakat Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un. Dua hal utamanya yang membedakan fenomena pembelotan dibawah masa kepemimpinan Kim Jong Un yaitu dorongan karena ketakutan *(Fear)* dan tarikan karena mencari kebebasan *(Freedom)*.

Berikut daftar faktor dorongan *(push)* dan faktor tarikan *(pull)* terjadinya pembelotan pada masa kepemimpinan Kim Jong Un;

Gambar 5. 1 Tabel perbedaan faktor pembelotan pada masa Kim Jong Un dan Sebelumnya

Faktor Pembelotan	**Sebelum Kim Jong Un**	**Masa Kim Jong Un**
1.Push Factor	• Pendudukan kekuatan blok besar di Utara dan Selatan yang membuat sebagian masyarakat meninggalkan wilayahnya baik dari Utara ke	• Keterbatasan hak-hak dasar manusia • Hukuman dan sanksi politik terhadap yang berlaku untuk seluruh kerabat keluarga • Penerapan system kelas social

	Selatan dan sebaliknya karena tidak mendukung ideologi • Perang dan Konflik, intervensi kedua kekuatan blok Soviet dan Amerika sehinga memecahkan peran anatar wilayah Utara dan Selatan yan membahayakan keselamatan warga sipil atau masyarakat biasa, sehingga memutuskan untuk mencari tempat yan lebih aman di beberapa wilayah sepert Cina, Rusia, dan Jepang. Bahkan beberpa terban ke Amerika melalui relasi anggota militer • Bencana alam	*(Songbun System)* yang berdampak bagi kesetaraan ekonomi • Tingkat suap dan korupsi yang semakin tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk membelot dengan membayar petugas atau penjaga • Perkembangan generasi *Jangmadang*, yaitu generasi yang berorientasi pada sistem pasar(kapitalis) dan kepercayaanya terhadap rezim yang berkurang.

2. Pull Factor	yaitu kekerinan dan kemarau panjang terlmaa yan pernah dialami Korea Utara. Sehingg memaksa masyarakat melintsi wilayah perbatasan untuk mencari pasokan makanan dan bantuan di wilayah lain sepert Cina yan sangat berdekatan dengan perbatasan Korea Utara	• Kemunculan kegiatan pasar ilegal *(Black Market)* • Masuknya aliran informasi melalui arus pergerakan lintas batas negara yang terus terjadi termasuk informasi

		mengenai fasilitas dan perlindungan yang tersedia di Korea Selatan

Jika dilihat dari situasi sebelum Kim Jong Un memimpin, masyarakat Korea Utara cenderung melakukan perpindahan atau *border-crossing* karena kekurangan sumber makanan dan kebutuhan terhadap sumber pendapatan untuk menunjang kondisi ekonominya. Namun faktor-faktor baru yang ternyata muncul di masa kepemimpinan kepeminnan Kim Jong Un memeperlihatkan adanya *shift* atau perubahan motivasi pembelotan oleh masyarakat Korea utara ke Korea Selatan.

Terlihat jelas bahwa faktor-faktor yan mendorong dan menarik masyarakat Korea Utara di masa kepemimpinan Kim Jong Un berbeda. Faktor-faktor yan disebabkan oleh perubahan iklim politik dan juga kebijakan internal Kim Jon Un terhadap negara dan rakyatnya. Masyarakat Korea Utara yang mulai terpapar dengan bantuan dan informasi dunia luar menyadari kebenaran propaganda yang selama ini disebarkan dan diajarkan oleh rezim.

Perubahan tersebut juga terlihat dari latar belakang pembelot masyarakat Korea Utara diatandai dengan karakteristik masyarakat yang tiba di Korea Selatan. Karakteristik seperti orientasi sosial atau latar belakang pekerjaan pembelot Korea Utara yang bervariatif sejak tahun 2012 menunjukkan adanya perubahan latar belakang. Sejak masa pasca Perang Korea banyak pembelot yang berdatangan berasal dari kalangan elit pemerintahan seperti diplomat, pejabat pemerintahan, akademisi, hingga aparat militer. Namun setelah tahun 2011 tepatnya setelah masa reformasi

ekonomi oleh Kim Jong-Un, latar belakang pembelot yang tiba di Korea Selatan berubah menjadi buruh, akademis, bahkan pengangguran.

Korea utara dengan sistem pemerintahan yang ototriter meberlakukan sejumlah kebijakan politik yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Seperti kebijakan yang mengontrol gerak –gerik masyarakat Korea Utara, peningkatan pengawasan pemerintah di wilayah perbatasan, hingga sanksi dan hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan dan melakukan perbuatan ilegal. Sejumlah masyarakat Korea Utara merasakan ketakutan terhadap peraturan rezim hingga mengancam kenyamanan kehidupan sehari – hari masyarakat Korea Utara.

Karakter kepemimpinan Kim Jong Un yang keras tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, namun juga bisa berlaku bagi orang – orang terdekatnya yang suatu waktu memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda mengenai rezim pemerintahan. Hal ini dilakukan Kim Jong Un untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan yang maksimal dengan mengontrol seluruh kebijakan baik politik maupun sosial.

Kebijakan – kebijakan internal pemerintah Korea Utara yang berupa kebijakan politik dan ekonomi mendorong masyarakat Korea Utara untuk membelot. Kebijakan yang tentunya tidak memihak masyarakat dan menyudutkan masyarakat Korea Utara terutama yang termasuk kedalam kelas paling rendah. Kebijakan – kebijakan tersebut juga terus meningkatkan rasa kecewa dan tidak percaya masyarakat terhadap rezim. Munculnya generasi *Jangmadang* juga sangat kuat pengaruhnya, generasi yang tidak lagi meletakkan atau menggantungkan hidupnya pada sistem dan peraturan pemerintah menjadi mandiri dan lebih berani terhadap rezim.

Kebijakan kontrol dan pengawasan perbatasan yang diperketat itu tidak menghetikan kegiatan pembelotan ataupun menghentikan perubahan – perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Korea Utara. Ini dibuktikan dengan masih terdapatnya aktifitas pembelotan dan perubahan masyarakat di dalam Korea Utara sendiri. Selain itu inefeketivitas sistem sosial di Korea Utara yang meningkat disebabkan oleh kekuasaan elit politik yang secara sosial dan ekonomi mendiskriminasikan masyarakat kelas rendah.

Keberadaan tabel diatas berujuan untuk memperlihatkan bahwa pembelotan masyarakat Korea Utara ini masih terus terjadi walau dalam jumlah yang kecil. Perubahan factor dan motivasi yang disebabkan oleh akses dan perubahan mengakar yang terjadi di kalangan masyarakat Korea Utara dipercaya akan membawa perubahan dalam konteks sosio-kultural masyarakat Korea Utara sendiri. Masyarakat Korea Utara yang mulai terekspos dengan dunia luar mulai menyadari propaganda dan sedikt demi sedikit menerapkan karakter yang tidak sepenuhnya mempercayai pemerintah rezimnya.

Faktor – faktor yang menimbulkan adanya motivasi pembelotan masyarakat korea Utara dalam waktu 10 tahun terakhir juga merupakan efek samping dari iklim kebijakan pemerintah Korea Utara. Kebijakan politik dan ekonomi Korea Utara yang represif dan sulit untuk di prediksi membuat masyarakat berinisiatif untuk membelot. Kim Jong-Un selama pemerintahannya telah melakukan banyak pertemuan dengan pemimpin – pemimpin negara besar, Namun dalam pertemuan tersebut isu kemanusiaan masyarakat Korea Utara tidak menjadi prioritas diskusi. Hal tersebut menjadikan fenomena pembelotan masyarakat Korea Utara ke Selatan ini mendapatkan sedikit perhatian masyarakat internasional pada awalnya. Namun setelah sekian jumlah masyarakat Korea Utara yang tiba di Korea Selatan

secara tidak langsung telah mengubah pandangan masyarakat internasional terhadap keadaan sebenarnya di Korea Utara.

Selain mendapatkan perhatian masyarakat internasional, fenomenan pembelotan masyarakat Korea Utara ini juga akan memancing perubahan secara perlahan di kalangan masyarakat Korea Utara. Dengan ini berbagai macam tantangan yang lebih besar akan mengganggu ketahanan dan konsistensi rezim mempertahankan Korea Utara dari pengaruh – pengaruh dunia luar. Di sisi lain, berdasarkan analisa *push – pull factors*, pembelotan masyarakat Korea Utara tersebut akan terus menjadi kontribusi utama dalam mendorong atau menarik masyarakat Korea Utara untuk membelot.